

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



LKPJ

KECAMATAN DANAU KEMBAR

TAHUN 2021

**URUSAN PENUNJANG
KECAMATAN DANAU KEMBAR**

• **Program dan Kegiatan**

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Umum Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara republic Indonesia

- **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Urusan**

SKPD penyelenggara urusan Kecamatan adalah Kecamatan Danau Kembar beserta jajarannya.

- **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.**

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Danau Kembar, sebagai berikut :

- Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :
 - Camat / Eselon III A : 1 orang
 - Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
 - Kepala Seksi / Eselon IV A : 3 orang
 - Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 1 orang
 - Staf Pelaksana : 6 orang
- Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :
 - Golongan IV : 3 orang
 - Golongan III : 7 orang
 - Golongan II : 4 orang
- Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :
 - Pendidikan S 2 : - orang
 - Sarjana / S 1 : 8 orang
 - Diploma 3 : 0 orang
 - SLTA/ sederajat : 5 orang

- **Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Ikhtisar pencapaian alokasi dan realisasi anggaran merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- Nilai Target Total
 - Target Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Kecamatan Danau Kembar adalah Rp. 5.000.000 ,-
 - Anggaran Belanja yang ditetapkan setelah perubahan anggaran adalah Rp. 1.709.044.301,00-
- Nilai Realisasi Total
 - Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai Kec. Danau Kembar adalah Rp. 5.000.000,-
 - Realisasi belanja Kecamatan Danau Kembar Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.709.044.301,00-

- Persentase Perbandingan antara Target dan Realisasi

No	Indikator	Target/Anggaran	Realisasi	% Pencapaian
1.	PAD	5.000.000	1.200.000	24
2.	Belanja langsung SKPD	1.709.044.301,00-	1.709.044.301,00-	100

Sedangkan untuk target dan realisasi per program/kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.604.873.679	1.315.968.727
		• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000
		• Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.950.000	6.840.000
		• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.604.873.679	1.315.968.727
		• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		• Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	3.000.000
		• Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000
		• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	550.000	550.000
		• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.421.660	52.010.600
		• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.862.750	17.557.750
		• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.943.350	5.064.350
		• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.027.500	79.350.200
		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
		• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	579.000	829.000
		• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.401.840	4.401.840

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	4.000.000	4.000.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 	74.160.000	64.748.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	3.216.706	37.823.734
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	1.910.000	1.910.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	139.897.800	96.549.800
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 	5.350.000	3.800.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 	34.220.000	22,341.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum			
		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara republic Indonesia 	4.800.000	4.800.000
	Total		2.049.264.285	1.709.044.301

- **Proses Perencanaan Pembangunan**

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus mengacu dan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, mencakup beberapa pendekatan sekaligus merupakan kriteria dan unsur dalam rangkaian proses perencanaan, yaitu : a. Teknokratik, b. Partisipatif, c. Pendekatan politis, d. Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Pendekatan ini dimaksudkan agar aspirasi tingkat bawah dengan kepentingan tingkat atas akan saling terakomodir secara jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan SKPD mengacu pada arah pembangunan dan skala prioritas pembangunan yang tertuang pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Solok. Proses perencanaan pembangunan tersebut melalui kegiatan :

- Telaahan terhadap perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Solok. Telaahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar fungsi SKPD. Hasil ini juga menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD dalam waktu 5 (lima) tahun.
- Menyusun Renstra SKPD yang merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program/kegiatan setiap urusan bidang. Penyusunan visi, misi, tujuan dan kebijakan dalam renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra merupakan pedoman dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- Menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran SKPD.
- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SKPD sebagai awal dalam penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang telah dianggarkan merupakan langkah awal untuk mencapai visi SKPD secara khusus dan mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam RPJMD secara umumnya.

- **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan**

Untuk sarana dan prasarana yang digunakan di Kecamatan Danau Kembar cukup baik. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

- **Permasalahan dan solusi**

Permasalahan yang ditemui pada SKPD Kecamatan Danau Kembar dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kondisi Kepegawaian belum berkompentensi baik.

Dari pemaparan kondisi kepegawaian per 31 Desember 2021, dapat lihat dari 7 orang staf, hanya 2 orang yang berpendidikan S1, selebihnya adalah berpendidikan SLTA Sederajat. Selain itu, kondisi pejabat struktural masih ada yang belum terisi,

namun dari 4 orang pejabat eselon IV, baru 1 orang yang mengikuti diklat pim IV. Dan untuk pejabat eselon III, belum ada yang mengikuti diklat pim III.

- Akseibilitas yang masih sulit dikecamatan
Kondisi jalan yang buruk, tidak adanya akses angkutan umum untuk ke kecamatan kadang membuat masyarakat 'malas' untuk datang ke kantor dan juga akses jaringan telekomunikasi belum tersedia sehingga kadang masyarakat sedikit 'kecewa' karena bahan mereka belum lengkap atau karena camat sedang dinas luar sehingga membuat mereka harus bolak balik ke kantor.
- Anggaran Kecamatan yang masih minim
Setiap tahunnya anggaran kecamatan terus menerus dikurangi. Dengan kegiatan yang terus bertambah setiap tahun dengan kondisi anggaran yang semakin dipangkas sangat menghambat kinerja dari Kecamatan Danau Kembar.

Solusi yang disarankan dalam pemecahan masalah :

- Agar BKPSDM melakukan mutasi staf dan meletakkan staf yang berkompetensi di masing-masing kecamatan secara adil dan merata. Selain itu agar BKPSDM kembali mengaktifkan kegiatan diklat pim IV dan III untuk para pejabat struktural kecamatan.
- Kondisi akses jalan ke kantor kecamatan danau kembar sudah agak membaik agar dapat diperbaiki kedepannya untuk kelancaran aktifitas dan kenyamanan masyarakat.
- Diharapkan kepada Tim TAPD Kab.Solok untuk tidak terus menerus melakukan pemangkasan anggaran terhadap kecamatan. Dengan beban kerja yang masih sama dan malah bertambah, pemangkasan anggaran sangatlah tidak wajar dan mengganggu kelancaran kinerja kecamatan

**DAFTAR PENDUDUK YANG MENGURUS IMB PADA TAHUN 2021
DI KECAMATAN DANAU KEMBAR**

No	NAMA	Alamat	Jumlah retribusi (Rp)
1		Air Tawar Selatan	Rp. 1.200.000,-
	Jumlah		

NB : Ada 1 (satu) orang pada Nagari Kampung Batu Dalam.yang mengurus registrasi IMB di Kec.Danau Kembar pada tahun 2021.

